

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Kemampuan untuk memenuhi standar hidup seseorang dengan pendapatan seseorang menentukan status seseorang sebagai "miskin." (Nugroho, 1995). Bank Dunia (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan. Secara teoritis, kualitas hidup masyarakat harus menyediakan cukup makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Lokasi yang terhormat untuk tinggal atau tinggal membahayakan kesejahteraan masyarakat dan standar hidup di wilayah tertentu. Dalam keadaan ini, sebuah peradaban dianggap miskin jika standar hidupnya jauh lebih rendah dari pendapatan rata-rata dan memiliki prospek yang sedikit untuk berkembang sendiri. Menurut Suryawati (2004). (Keynes)

Bank Dunia (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan. Secara teoritis, kualitas hidup masyarakat harus menyediakan cukup makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Lokasi yang terhormat untuk tinggal atau tinggal membahayakan kesejahteraan masyarakat dan standar hidup di wilayah tertentu. Dalam keadaan ini, sebuah peradaban dianggap miskin jika standar hidupnya jauh lebih rendah dari pendapatan rata-rata dan memiliki prospek yang sedikit untuk berkembang sendiri. Menurut Suryawati (2004). Keynes menegaskan bahwa pengeluaran konsumsi secara eksklusif ditentukan oleh tingkat pendapatan besar dan kecil dari populasi..

Ketika seseorang tidak bekerja, itu berarti mereka sedang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukannya. Yanar (2006). Pengangguran adalah keadaan di mana anggota tenaga kerja tidak memegang pekerjaan dan tidak secara aktif mencari pekerjaan, menurut Nanga. (2005: 249). Jumlah pekerja di sebuah ekonomi yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan dikenal sebagai pengangguran. Tanjungpinang (2004), p. Pengangguran

didefinisikan oleh (BPS, 2001: 8) sebagai keadaan di mana seseorang bekerja kurang dari dua hari seminggu atau tidak sama sekali.

Penilaian perbandingan harapan hidup, literasi, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia disediakan oleh Indeks Pembangunan Manusia (HDI). (UNDP and Biro Pusat Statistik, 1997). Keynes berpendapat bahwa tidak ada sistem penyesuaian otomatis built-in yang memastikan perekonomian akan stabil pada pekerjaan penuh. Ini termasuk dalam analisis pasar tenaga kerja. Malthus mengatakan bahwa evolusi manusia terjadi jauh lebih cepat daripada kemampuan untuk menyediakan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Para peneliti memeriksa beberapa penelitian sebelumnya yang telah terhubung dengan penyebab atau keadaan yang mempengaruhi kemiskinan dalam bab ini. Beberapa studi tersebut menunjukkan bahwa tujuan dasar dari meninjau penelitian sebelumnya adalah untuk berfungsi sebagai referensi bagi peneliti masa depan dan untuk mengkonfirmasi temuan analisis penelitian ini :

“Zuhdiyati (2017), membahas faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 2011-2015. Adapun variabel yang digunakan yang digunakan dalam penelitiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, alat analisis yang digunakan adalah regresi dan data panel. Dari hasil yang diteliti ditemukan bahwa secara bersamaan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien determinan 0.968 (*R-square*). Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (IPM) dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan”.

“Menurut (Dwihapsari, 2017) pada penelitiannya bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia 2000-2015. Penelitiannya menggunakan data sekunder sebagai yaitu data time series dari

tahun 2000-2015. Penduduk Miskin sebagai indikator Kemiskinan, growth sebagai Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran. Alat analisis yang digunakan regresi linier berganda atau Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan analisis yang dihasilkan ditemukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dari hasil analisis pemerintah hendaknya memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja, sehingga dapat dan mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia”.

“Susanti (2013), dalam penelitiannya mengenai Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Jawa Barat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat. Pengangguran secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Barat”.

“Pratama (2014), dalam penelitiannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012, melihat apakah ada perbedaan Tingkat Kemiskinan antar Provinsi dengan satu provinsi sebagai basis perbandingan. Variabel dalam penelitiannya adalah Tingkat Pendidikan, Pendapatan Perkapita, Konsumsi, tingkat Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisis berganda. Hasil dari penelitian, memperlihatkan adanya pengaruh secara berkesinambungan atau simultan pada variabel Tingkat Pendidikan, Pendapatan Perkapita, konsumsi, tingkat Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan memiliki koefisien determinan 0,56 (R-Square). Pada variabel konsumsi, pendapatan perkapita, tingkat inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia berdampak negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan tingkat pendidikan memiliki dampak positif terhadap Tingkat Kemiskinan”.

“Sukmaraga (2011), dalam penelitiannya seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah Pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada

tahun 2018. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdampak negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Pada variabel Pengangguran berdampak atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah”.

Pada penelitian terdahulu banyak mengangkat judul tentang masalah kemiskinan kabupaten atau kota, provinsi dan tidak lupa kemiskinan nasional yang ada di Indonesia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang ada di semua negara di dunia, baik itu negara maju dan negara berkembang tidak luput dari kemiskinan. Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia tidak luput dari masalah kemiskinan yang ada. Penduduk miskin di Indonesia sangat banyak dan sangat sulit untuk meretas kemiskinan yang ada didalamnya. Dengan kemiskinan yang tinggi, banyak penelitian terdahulu meneliti tentang kemiskinan di Indonesia baik di kota, provinsi maupun skala nasional.

► Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pendidikan, PDRB, Gaji Minimum Daerah / Kota, Populasi, Skala Karakter, Kesehatan, dan Investasi adalah variabel yang sering digunakan dalam studi tentang kemiskinan. Sejumlah teknik analisis model, termasuk regresi data panel, regresi linear ganda, regression linear sederhana, minimum biasa persegi (OLS), korelasi, PLS, logistik, rute analitis, dan secara simultan, telah digunakan oleh para peneliti sebelumnya untuk menentukan dampak pada kemiskinan di Indonesia.

B. Kemiskinan

1. Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan

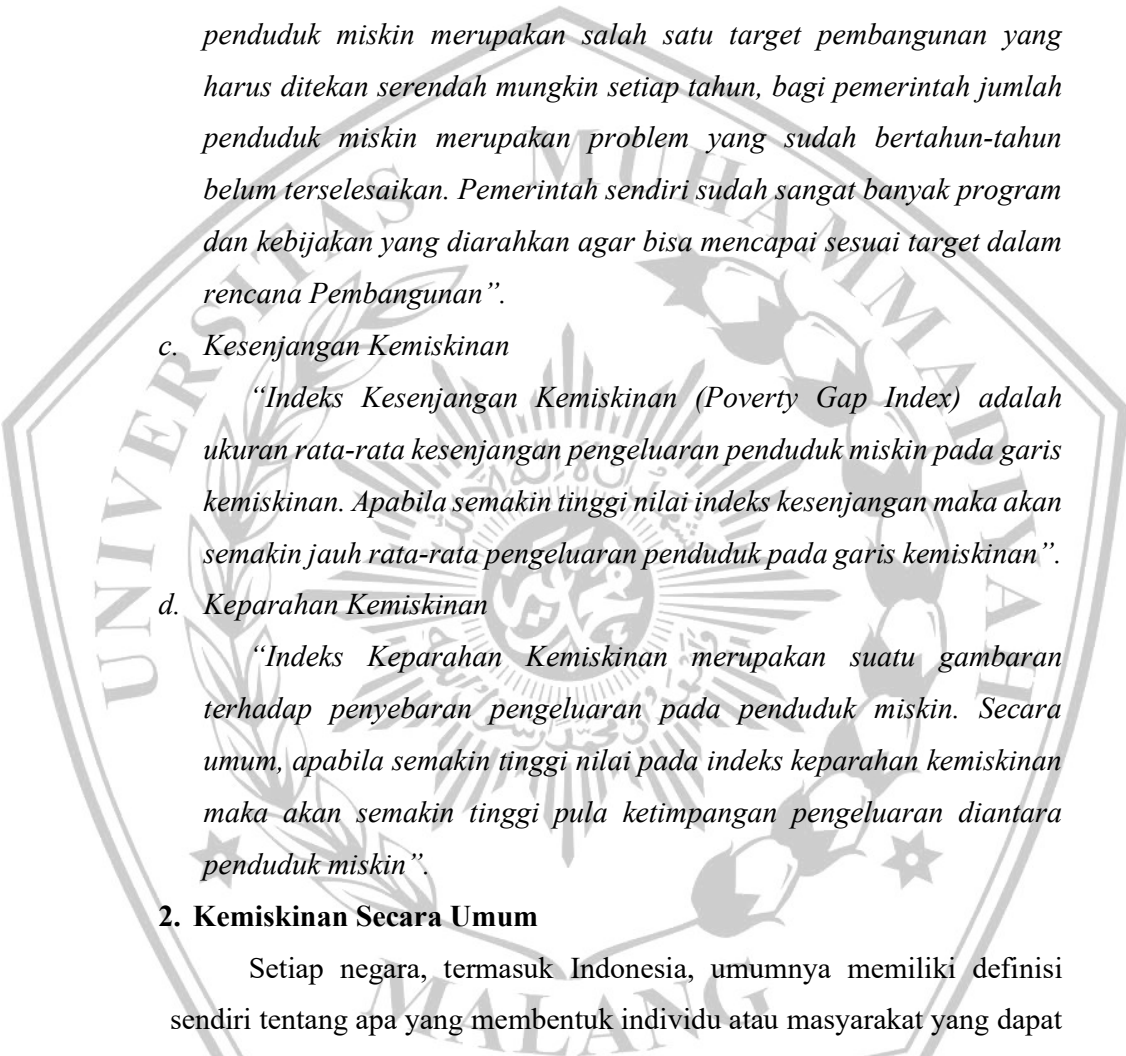
Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar adalah gagasan yang digunakan BPS untuk mengukur kemiskinan. (basic needs approach). Menurut metode ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang pada dasarnya secara ekonomi dan bukan sebagai akibat dari pengeluaran makanan. Oleh karena itu, mereka yang menghabiskan kurang dari ambang kemiskinan pada rata-rata bulanan per kapita dianggap miskin.

Seseorang dianggap berada dalam kemiskinan jika mereka tidak mampu mendukung kualitas hidup keluarga mereka dalam komunitas mereka. Ketidakmampuan seseorang untuk menutupi biaya dasar mereka untuk makanan, tempat tinggal, dan papan mungkin didefinisikan oleh pendapatan rendah mereka. Kemampuan individu yang berkurang untuk mencapai standar juga dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan rendah.

Kemiskinan pengertian, yang sering ditemukan di negara-negara dunia ketiga dan kurang berkembang, adalah kemiskinan yang saat ini umumnya diklasifikasikan sebagai studi konstruksi. Ketidakpuasan sosial di negara-negara ini telah diungkapkan dalam bentuk ketidaksetujuan politik atau sosial. Ini hanya salah satu jenis ketidakmampuan pendapatan. Menurut Suryawati (2004). Selain itu, ekspansi ekonomi yang tidak seimbang menyebabkan kemiskinan, jenis stres yang terkait dengan pembangunan yang memperburuk kesenjangan pendapatan regional yang berkembang. (Harahap, 2006). Studi pengembangan hari ini sebagian besar berfokus pada variabel yang mungkin menyebabkan kemiskinan; Namun, beberapa mulai mengidentifikasi semua variable yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada kemiskinannya. Batas kesejahteraan itu sendiri adalah inti dari masalah kemiskinan. Ketidakmampuan seseorang untuk mencapai persyaratan minimum untuk eksistensi yang layak merupakan kemiskinan. (both non-makanan and makanan foods). Jumlah uang yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk menutupi kebutuhan non-makanan, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai produk dan layanan lainnya, dikenal sebagai garis kemiskinan, seperti yang didefinisikan oleh BPJS. (Suaharto).

a. *Tingkat Kemiskinan*

“Tingkat kemiskinan sendiri adalah suatu prosentase jumlah sautu penduduk dengan pengeluaran per kapita kurang atau berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum standar hidup yang mencukupi di suatu

negara. Status miskin adalah suatu keadaan yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)”.


b. Jumlah Penduduk Miskin

“Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang standar hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu periode tertentu. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu target pembangunan yang harus ditekan serendah mungkin setiap tahun, bagi pemerintah jumlah penduduk miskin merupakan problem yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Pemerintah sendiri sudah sangat banyak program dan kebijakan yang diarahkan agar bisa mencapai sesuai target dalam rencana Pembangunan”.

c. Kesenjangan Kemiskinan

“Indeks Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap Index) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin pada garis kemiskinan. Apabila semakin tinggi nilai indeks kesenjangan maka akan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk pada garis kemiskinan”.

d. Keparahan Kemiskinan

“Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan suatu gambaran terhadap penyebaran pengeluaran pada penduduk miskin. Secara umum, apabila semakin tinggi nilai pada indeks keparahan kemiskinan maka akan semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin”.

2. Kemiskinan Secara Umum

Setiap negara, termasuk Indonesia, umumnya memiliki definisi sendiri tentang apa yang membentuk individu atau masyarakat yang dapat diklasifikasikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa istilah "miskin" mengacu pada situasi yang bervariasi tergantung pada negara, seperti kondisi kesejahteraan, ekonomi, dan sosial yang khas. Setiap definisi memiliki ukuran atau seperangkat kriteria yang didasarkan pada keadaan tertentu, seperti pendapatan rata-rata, daya beli rata-ratanya atau kapasitas konsumen, kesehatan purata, dan pencapaian pendidikan purata.

Identifikasi dan penilaian kelas masyarakat atau kelompok yang dikenal sebagai miskin berfungsi sebagai dasar untuk gagasan kemiskinan. (Nugroho, 1995).

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, membuat seseorang tidak dapat memastikan keberadaan diri sendiri. Suryawati (2004), halaman 122. Seperti yang dinyatakan dalam deskripsi di atas, kemiskinan umumnya dipahami sebagai keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri serta kebutuhan orang-orang yang mampu hidup dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004, *“kemiskinan adalah kondisi social ekonomi seseorang atau kelompok yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang hak seseorang atau kelompok orang meliputi kebutuhan pangan, Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan social dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikelarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebutkan miskin juga berlaku pada mereka yang bekerja kan tetapi pendapatannya tidak mecukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar”*.

Para ahli kemudian melihat definisi kemiskinan dan memperluasnya berdasarkan masalah yang terkait dengan kemiskin serta variabel apa pun yang mempengaruhi atau berkontribusi pada Kemiskinan. Definisi kemiskinan yang diusulkan oleh Chambers adalah satu yang sekarang menarik perhatian dalam semua program negara berkembang yang bertujuan untuk menghapusnya. Menurut definisi Chambers, kemiskinan dipandang sebagai konsep terpadu dengan lima komponen, yaitu:

a. Kemiskinan (*Proper*)

“Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan”.

b. Ketidakberdayaan (*Powerless*)

*“Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan social (*Social Power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

c. Kerentanan Menghadapi Situasi Darurat (*State of Emergency*)

“Seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi berupa bencana alam, kondisi Kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relative mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini”.

d. Ketergantungan (*Dependency*)

“Keterbatasan kemampuan pendapatan kekuatan social dari seseorang atau kelompok yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan”.

e. Keterasingan (*Isolation*)

“Definisi keterasingan seperti yang dimaksud oleh Chambers adalah factor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan Sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau alun-alun besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relative memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan”.

3. Factor Penyebab Kemiskinan

Factor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia ada beberapa penyebab adalah sebagai berikut ;

- a. *“Pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri terus meingkat pada setiap tahunnya, menurut hasil dari sensus penduduk di Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1990 penduduk Indonesia sebesar 179 juta jiwa lebih penduduk. Pada sensus penduduk sensus penduduk di tahun 2000 juga mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar 27 juta jiwa dan kalua di jumlah sama tahun 1990 menjadi 206 juta jiwa. Pada sensus prnduduk di tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 32 juta jiwa dan kalua di jumlah pada tahun 1990 dan 2000 menjadi 270 juta jiwa lebih penduduk Indonesia. Dengan bertambahnya penduduk dan kepadatan penduduk di Indonesia menjadikan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 terbanyak di dunia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan Indonesia semakin terpuruk dan dengan keadaan ekonomi Indonesia yang sepenuhnya belum mapan. Jumlah penduduk yang sudah bekerja dengan penduduk yang belum bekerja tidak sepadan dan juga penghasilan yang minim juga mengakibatkan beban ketergantungan yang harus di tanggung membuat penduduk berada di bawah garis kemiskinan yang tinggi”.*

b. “Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan nasional yang tidak merata dapat mencerminkan timpangan pembagian hasil dari pembangunan negara di dalam penduduknya. Kriteria akan ketidakmeratannya distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan versi Bank Dunia didasarkan atas beberapa porsi pendapatan nasional yang dapat dinikmati oleh 3 lapisan penduduk seperti empat orang penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin), 40% penduduk yang berpendapatan rendah dan 20% penduduk yang berpendapatan tinggi (penduduk kaya). Dengan tidak meratannya distribusi pendapatan maka akan mengakibatkan tingginya penduduk miskin yang tidak dapat menikmati pembangunan nasional”.

Menurut Kartasamito (1996), konsep kemiskinan berdasarkan pola waktu, yaitu :

- a. “Kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerah yang terisolasi (*persistent poverty*);
- b. Kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan (*cyclical poverty*);
- c. Kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan (*seasonal poverty*);
- d. Kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (*accidental poverty*)”.

4. Pengukuran Kemiskinan

Ada berbagai cara untuk mendefinisikan kemiskinan, tetapi kebanyakan orang memikirkannya dalam hal situasi finansialnya. Banyak upaya oleh para spesialis untuk menggambarkan dan mengidentifikasi kemiskinan yang sebenarnya menyebabkan kerangka konseptual yang terlalu disederhanakan. Pertama, kemiskinan mutlak dan relatif dibedakan satu sama lain dalam hal pengukuran. Kedua, kemiskinan dapat diklasifikasikan sebagai alami atau struktural dari sudut pandang

penyebab. Untuk berhasil, kebijakan penghapusan kemiskinan harus jelas tentang kondisi apa yang harus dipenuhi atau segmen populasi mana yang dapat dianggap miskin dan berpotensi menjadi fokus inisiatif di masa depan. Selain itu, beberapa prasyarat perlu dipenuhi untuk mengidentifikasi penyebab pasti kemiskinan di setiap komunitas dan daerah.

Badan Statistik Pusat (BPS) menyatakan bahwa kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar adalah dasar untuk pengukuran kemiskinan BPS. (approach of fundamental necessities). Ide ini didasarkan pada Manual Bank Dunia tentang Kemiskinan dan Ketidaksetaraan. Menurut metode ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan karena situasi keuangan seseorang dan bukan jumlah makanan yang dikonsumsi. Jika rata-rata pengeluaran bulanan per kapita seseorang kurang dari garis kemiskinan, mereka dianggap miskin.

Haughton dan Khandker (2009:22-25) menyatakan bahwa ada dua metode untuk menghitung kemiskinan: pengeluaran dan pendapatan. Menggunakan pendapatan rumah tangga sebagai proxy untuk kebahagiaan. Metode untuk menghitung kemiskinan adalah pendapatan = konsumsi + perubahan nilai bersih. Sebaliknya, pengeluaran konsumen dapat digunakan untuk mengevaluasi kemiskinan dengan factoring pada barang dan jasa yang diproduksi dan digunakan secara internal. Tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar seseorang – seperti pakaian, makanan, perumahan, dan perawatan medis – mendefinisikan kemiskinan. Hardinandar (2009) mengatakan. Tingkat kemiskinan di suatu negara adalah salah satu indikator dari kondisi sosial dan ekonomi dan dapat digunakan untuk menilai seberapa baik pemerintahnya membangun infrastrukturnya. Pada tahun 2001, Oktaviana et al.

C. Pengangguran

Di setiap negara, pengangguran adalah masalah yang signifikan ketika datang ke kemiskinan. Karena populasi berkembang setiap tahun, ada semakin banyak orang yang mencari pekerjaan, yang akan mengakibatkan peningkatan tenaga kerja. Angkatan kerja akan diklasifikasikan sebagai pengangguran jika tidak diasimilasi secara efektif ke tempat kerja.

Setiap negara memiliki tantangan yang signifikan dengan pengangguran, yang telah lama menjadi faktor kunci dalam memerangi kemiskinan. Ketika kita membahas pengangguran, kita membicarakan kesulitan sosial dan ekonomi karena, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, orang-orang yang tidak bekerja dapat memperburuk masalah sosial selain menghalangi kemajuan ekonomi.

Salah satu masalah atau penyakit ekonomi yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengangguran. Orang-orang yang tidak bekerja tidak akan mendapatkan uang, yang akan menyebabkan mereka menjadi miskin. Secara umum, pemerintah akan mengatasi pengangguran dengan mencari pekerjaan besar dan peluang kerja di sektor swasta serta di sektor pemerintah sendiri. Sadono Sukino (1994) mendefinisikan pengangguran sebagai keadaan di mana anggota tenaga kerja mencari pekerjaan tetapi tidak dapat mendapatkannya. Tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat.

The causes of unemployment include, but are not limited to, unfavorable economic conditions, unsocially beneficial policies of the government, low levels of education and skill, the growth of fictitious economic sectors, a shortage of jobs and a rise in job seekers, intense competition for jobs, and irregularities in the labor market. High levels of education but insufficient access may make it difficult for graduates of education programs to find employment in an industry that is growing annually and showing no signs of slowing down.

Pekerjaan adalah salah satu faktor kunci yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan juga berfungsi sebagai barometer untuk efektivitas "Pendidikan" dalam menurunkan tingkat kemiskinan, karena kurangnya pekerjaan yang tersedia menyebabkan tingkat pengangguran meningkat setiap tahunnya. Namun, pengangguran juga memiliki dampak sosial negatif yang signifikan, seperti

peningkatan kejahatan di setiap bidang sebagai akibat dari ekspansi ekonomi. Karena kompleksitas masalah dan pendekatan yang beragam yang digunakan untuk memecahkannya, upaya untuk mengatasi hal itu melampaui sektor sekolah. Fenomena usaha mandiri kadang-kadang menyebabkan pembentukan berbagai masyarakat seperti yang ditunjukkan di atas. Konsekuensi negatifnya juga mengakibatkan penurunan sosial.

Menurut Marius 2004 di (Prasetyo, 2015), pengangguran sering dilihat sebagai tenaga kerja yang tidak bekerja atau tidak bekerja untuk potensi penuhnya. anatar lain:

a. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

“Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha semaksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau amalas bekerja”.

b. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*)

“Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dalam kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal”.

c. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

“Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan disuatu proyek untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya”.

Menurut Marius 2004 dalam (Prasetyo, 2015) masyarakat bahwa bila ditinjau dari sebab-sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi tujuh, yaitu:

a. Pengangguran Friksional (*Transisional*)

“Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda”.

b. Pengangguran Struktural

“Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian yang menyebabkan kelemahan di bidang lain. Contoh: suatu daerah yang tadinya agraris (pertanian) menjadi industry, maka tenaga kerja bidang pertanian akan menganggur”.

c. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural

“Pengangguran ini terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Contoh: disuatu perusahaan Ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Sebaliknya Ketika usahanya merugi terus maka akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau pemecatan”.

d. Pengangguran Musiman (*Seasonal*)

“Pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh: pada musim ikan, para nelayan akan bekerja dengan giat sementara sebelumnya menganggur”.

e. Pengangguran Teknologi

“Pengangguran ini terjadi karena adanya pengangguran alat-alat teknologi yang semakin modern”.

f. Pengangguran Politis

“Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran”.

g. Pengangguran Deflatoir

“Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan”.

1. Dampak Pengangguran

Menurut Nanga (2001:260) dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat maupun perekonomian adalah :

- a. *“Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin di capainya. Sehingga apabila kesejahteraan masyarakat rendah maka akan timbul masalah, social, misalnya kemiskinan, ketimpangan dan kesengsaraan”*.
- b. *“Pengangguran menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat di pertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam waktu yang lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerjaan menjadi merosot”*.
- c. *“Pengangguran menyebabkan kehilangan mata percaharian dan pendapatan. Kehidupan penganggur harus dibiayai dengan investasi atau tabungan masal lau atau pinjaman. Keadaan ini bisa mengakibatkan pertengkar dan kehidupan keluarga menjadi kurang harmonis”*.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan oleh Program PBB untuk Pengembangan (UNDP) sebagai “proses untuk memperluas pilihan bagi populasi”. (Human Development Report, 2001). Ini berarti bahwa individu memiliki lebih banyak pilihan untuk mencapai kebutuhan budaya, sosial, dan ekonomi mereka. Tiga faktor dapat dianggap penting dalam pengambilan keputusan manusia: hidup panjang dan sehat, mendapatkan akses ke penelitian dan sumber daya, dan mencapai standar hidup yang terhormat.

a. Angka Harapan Hidup

“Angka Harapan Hidup adalah merupakan rata-rata usia yang diperkirakan pada atas dasar angka kematian dalam masa tersebut yang mana cenderung tidak berubah pada masa yang akan datang. Angka Harapan Hidup sendiri merupakan suatu sarana atau evaluasi

dalam kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat pada umumnya di suatu negara”.

b. Rata-rata Lama Sekolah

“Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang sudah dihabiskan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis Pendidikan yang dijalani. Mereka yang sudah tamak sekolah dasar/SD lama sekolah 6 tahun. Tamat SMP diperhitungkan sekolah 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan sekolah 12 tahun tanpa harus memperhitungkan apakah tinggal kelas atau tidak”.

c. Standar Hidup yang Layak

“Standard of Living atau standar hidup layak adalah salah satu acuan atau indicator dalam IPM, acuan dalam jumlah kualitas barang dan jasa yang tersedia dalam populasi tertentu. Dalam mencakup standar hidup layak ada beberapa factor material dasar seperti pendapatan, produksi domestik bruto (PDB), harapan hidup dan peluang ekonomi”.

Sebuah ukuran komposit yang juga dapat digunakan sebagai indikator, Human Progress Measure (HDI) dapat mengukur dan menggambarkan kemajuan manusia.

IPM pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. harapan hidup 85 tahun, tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai kualitas hidup yang terhormat nilai IPM suatu negara atau wilayah akan ditunjukkan oleh seberapa jauh negara atau daerah dapat mencapai tujuan pendidikan untuk semua kelas atau sektor masyarakat tanpa pengecualian. Jalur menuju tujuan menjadi lebih dekat semakin tinggi nilai atau jumlah wilayah relatif 100.

Efektivitas inisiatif untuk meningkatkan kemampuan modal manusia dasar diukur oleh Indeks Pembangunan Manusia. Bagian dari pertumbuhan melalui empowerment populasi yang berfokus pada meningkatkan basis manusia disebut pengembangan manusia. Ukuran besar dan kecil dari daya beli, kesehatan, dan pendidikan digunakan untuk menghitung perkembangan. Semakin meningkatnya populasi, semakin tercapai tujuan pembangunan. Perbaikan adalah proses

pengembangan. Bupati, Nur (2013). Sumber daya manusia yang dapat memenuhi persyaratan pengetahuan, keterampilan, dan kompetisi di berbagai bidang keahlian diperlukan untuk pengembangan suatu bangsa atau negara. Metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi.

Tingkat di mana suatu masalah dapat ditangani di atas masalah yang paling dasar dapat digunakan untuk menilai kegagalan kemajuan manusia. Masalah khas termasuk kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak memadai, dan kesulitan dengan pembangunan manusia yang berkelanjutan dari perspektif ekonomi yang berbeda. Pemerintah mendapat manfaat besar dari pencapaian tujuan pembangunan yang diwakili dalam Indeks Pembangunan Manusia karena dapat memberikan bimbingan yang berguna dalam hal ini. Pada tahun 2017 ia bertemu dengan Merisca dan Haryadi. Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam pertumbuhan manusia untuk mencapai tujuan pembangunan. (UNDP, 1995).

a. Produktifitas

“Manusia berupaya meningkatkan produktifitas seras berpartisipasi secara penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan Sebagai bagian dari pembangunan manusia”.

b. Pemerataan

“Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan social politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas hidup”.

c. Kestinambungan

“Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga disiapkan untuk generasi mendatang. Segala sumber daya harus senantiasa dapat diperbaruhi”.

d. Pemberdayaan

“Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses pembangunan maka harus berpartisipasi dalam mengambil Keputusan”.

Dalam konteks makro, pengembangan sumber daya mengacu pada sejumlah ide. Ini mencakup seluruh proses peningkatan kapasitas manusia melalui serangkaian kegiatan, termasuk kemajuan pelatihan dan pendidikan, kesehatan dan nutrisi yang baik, peluang kerja, gaya hidup sehat, pengembangan tempat kerja, dan kebebasan untuk mengejar kemerdekaan politik. UNDP, 2011, sebagaimana dinyatakan dalam Sulaiman, 2012.

Pemerintah Guan harus bekerja untuk memperkuat dan meningkatkan basis sumber daya manusia untuk menghasilkan generasi masa depan yang dapat mempertahankan atau meningkatkan standar hidup bagi semua orang. Meningkatkan kemampuan fisik dan non-fisik yang mendasari masyarakat adalah masalah yang paling penting yang dihadapi oleh kebangkitan. (spiritual and mental). Tiga aspek perkembangan manusia digunakan untuk mengukur perbaikan dalam kualitas hidup: daya beli, yang ditentukan oleh nilai pengeluaran per kapita; kesehatan, yang didefinisikan oleh jumlah besar atau kecil harapan hidup pada saat lahir; dan pendidikan, yang ditetapkan oleh rata-rata usia sekolah dan harapan sekolah.

Human Development Index (HDI) adalah pencapaian pembangunan yang didasarkan pada banyak aspek fundamental kualitas hidup, menurut BPS. (2009). Empat komponen dari Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan oleh data yang digunakan untuk menghitung indeks ini: harapan hidup, yang mengukur kesuksesan di sektor kesehatan; literasi, yang diukur keberhasilan dalam pendidikan; panjang rata-rata sekolah, yang menilai keberhasilan di bidang pendidikan; dan daya beli, yang memeriksa kemampuan populasi untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang ditentukan oleh anggaran per kapita yang besar.

Menurut Hakim, (2002) terdapat indicator-indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana meliputi dasar pembangunan manusia yaitu:

- a. *“Hidup sehat dan juga umur yang dimiliki dapat diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. Umur yang Panjang diukur dengan rata-rata harapan hidup (dalam tahun) dari tingkat kelahiran. Dihitung dengan mengasumsikan bahwa bayi lahir dalam satuan tahun tertentu akan mengalami angka kematian seketika dari tiap kelompok umur sepanjang hidupnya”.*
- b. *“Pengetahuan yang diukur melalui angka melek huruf atau tingkat baca dan tulis yang dimiliki orang dewasa serta dikombinasikan dengan rata-rata lama harapan sekolah. Angka melek huruf yaitu presentasi penduduk yang dimiliki usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah rata-rata yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun keatas diseluruh jenjang Pendidikan formal yang dijalani”.*

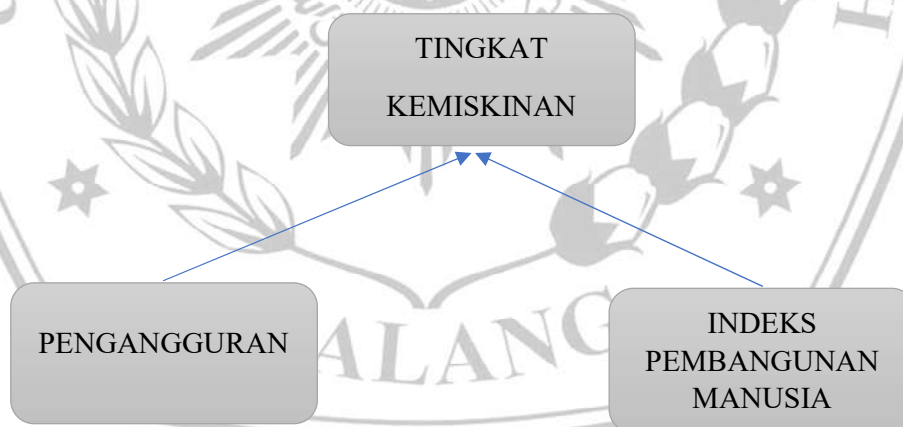
E. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran akan menjelaskan hubungan antara variable (Tingkat Kemiskinan) dan variable independent (Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia), ialah:

1. *“Hubungan antara Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan menurut teori lingkaran stan (nurske) yang menyebabkan kemiskinan disebabkan karena rendahnya produktivitas. Bisa diartikan pengangguran sendiri disebabkan karena produktivitas seseorang yang rendah. Pengangguran sendiri ialah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki pendapatan atau gaji. Dengan tidak adanya pendapatan atau gaji maka kebutuhan akan sehari-hari tidak bisa terpenuhi. Dengan kata lain pengangguran memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan, sehingga semakin tinggi pengangguran maka akan menyebabkan semakin tinggi pula tingkat kemiskinan disuatu wilayah, Efek buruk yang disebabkan oleh pengangguran adalah kurangnya pendapatan masyarakat dan menyebabkan kurangnya tingkat kemakmuran yang telah dicapai masyarakat. Semakin berkurangnya kesejahteraan akibat pengangguran dapat meningkatkan peluang masyarakat masuk kedalam kemiskinan karena memiliki pendapatan yang rendah (Sukirno, 2004)”.*

2. *“Hubungan antara Indeks Pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan disuatu negara untuk menyerap kemampuan teknologi modern serta digunakan untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2002), Indeks pembangunan manusia sendiri memiliki konsep yang bertujuan memperluas terhadap pilihan manusia terutama untuk memenuhi kebutuhan seperti Kesehatan, Pendidikan dan daya beli masyarakat. Indeks pembangunan manusia memiliki kesamaan dengan pembangunan manusia juga mempunyai peran penting bagaimana untuk bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Aspek-aspek yang ada pada indeks pembangunan manusia antara lain aspek fisik, aspek mental dan aspek intelegensi yang mana merupakan cara agar lepas dari kemiskinan. Suatu daerah atau wilayah yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi akan memiliki presentase indeks pembangunan manusia yang rendah, dan juga sebaliknya jika suatu daerah atau wilayah memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Bisa dikatakan indeks pembangunan manusia merupakan peran penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan”.*

Gambar 2.1



3. Hipotesis

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang sudah ada dan rumusan masalah yang sudah ada maka hipotesis pada penelitian in :

- a. *“Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan 9 Kota di Jawa Barat”.*
- b. *“Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan 9 Kota di Jawa Barat”.*

